

# KONSTRUKSI SOSIAL DALAM GLOBALISASI; Independensi Kebijakan Pemerintah Diantara Korporasi dan Civil Society

Oleh

**Chandra Dinata**

Pengajar di FISIPOL Universitas Merdeka Malang

## **Abstrak**

*Globalisasi mampu untuk merubah mindshet satu negara untuk menganut sistem liberal dalam perekonomian. Kebijakan-kebijakan negara yang dihasilkan mengarah pada kepentingan korporasi dengan dalih investasi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk itu guna memperlancar kepentingan korporasi, negara-negara maju baru berkembang di setting untuk menjadi negara "bergantung" dengan setumpuk hutang untuk percepatn pembangunan dinegara tersebut. Ketergantungan yang diciptakan mampu memberikan efek kejut bagi negara dalam menentukan kebijakan-kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara tentunya lebih berpihak pada kepentingan korporasi (pemilik modal). Dengan demikian, kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan oleh negara sangat sulit diimplemenasikan. Hal ini harus dikembalikan kepada jati diri bangsa secara kaffah sebagaimana dicita-citakan oleh founding father bangsa dengan jalan mengembalikan marwah yang terkoyak oleh globalisasi tanpa filter.*

**Kata Kunci : Globalisasi, Kebijakan, Ketergantungan, Kesejahteraan**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bagian-bagian paper ini penulis akan mendiskusikan beberapa hal terkait dengan perkembangan globalisasi dan implikasinya terhadap perilaku tatakelola pemerintahan yang dilihat dari persepektif implementasi kebijakan. Serta efek negative bagi kehidupan sosial masyarakat. Apakah kebijakan-kebijakan yang ditelurkan berpihak kepada rakyat ataupun kepada koorporasi? Hal ini menurut hemat penulis menjadi penting didiskusikan terkait dengan perkembangan perubahan perilaku masyakat dalam kehidupan sosial serta maraknya isu-isu keberpihakan Negara terhadap korporasi di era kekinian. Untuk itu perlu dicari jalan

keluar atas kecangnyanya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia, harus ada filterisasi atas pengaruh negatif dari globalisasi agar karakter dasar bangsa Indonesia tidak tercerabut dari akarnya. Yakni akar sejarah dalam substansi cita-cita *faunding father* bangsa Indonesia saat diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta. Sebagai bahan *kontemplasi* dalam kita memandang globalisasi di Indonesia, penulis juga menyajikan beberapa fakta perlawanan atas bergulirnya globalisasi di beberapa Negara berkembang. Selain itu beberapa teori modern tentang globalisasi juga penulis sajikan agar dapat membuka cakrawala pemikiran kita untuk mendiskusikan permasalahan globalisasi.

Fenomena globalisasi di Negara kita menjadi isu “seksi” yang terkadang kita sering tidak jeli dalam membaca realitas atas perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Globalisasi menjadi momok yang menakutkan dalam kehidupan bermasyarakat. Merubah segala sendi kehidupan dari pola kehidupan produktif menjadi pola hidup konsumtif, yang didorong oleh kekuatan media massa dalam mempromosikan produk-produk global (Heru Nugroho dalam Ritzer, 2006) mulai dari *fasion, food*, hingga *facial*. Dari kebutuhan primer, sekunder hingga kebutuhan tersier, semua menjadi sasaran empuk bagi *korporasi* melancarkan strategi-strategi jitu untuk menguasai konsumen yang kian hari semakin konsumtif. Tanpa disadari bahwa perubahan perilaku itu membawa dampak besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara di Negara-negara baru berkembang seperti Indonesia khususnya. Oleh Bahagijo (2006;19) Indonesia laksana kapal yang menempuh lautan globalisasi dengan glombang besar, namun gagal membuat peta dan gagal menemukan jalan yang aman bagi warga negaranya.

Ironisnya, pemerintah sebagai manifestasi dari Negara seharusnya hadir sebagai fasilitator masyarakat dari segala lapisan diharapkan ‘netral’ guna untuk mencapai kesejahteraan bersama. Namun

harapan itu jauh panggang dari api. Pemerintah dengan otoritasnya memutar kemudi dan melirik pada kelompok besar yang memiliki ‘modal’ untuk kepentingan pasar. Oleh karena itu masyarakat hanya menjadi objek bagi para kapital yang bersekongkol dengan Negara agar dapat meraup keuntungan dari proses pasar. Proses-proses tersebut mampu untuk merubah *mindset* masyarakat menjadi praktis di era globalisasi.

Pada dasarnya tak dapat dipungkiri bahwa globalisasi akan terus berkembang merambah ke Negara-negara tujuan dari globalisasi, yakni Negara maju baru berkembang. Globalisasi dengan *setting* internasionalisasi segala aspek kehidupan masyarakat diharapkan oleh Negara pengendalinya mampu untuk digerakkan bagaikan ‘boneka’ agar segala kepentingan dapat masuk dengan mudah di negara tujuannya agar muncul ketergantungan. Semakin tinggi ketergantungan suatu Negara maka semakin mudah pula program-program globalisasi dilancarkan.

### **GLOBALISASI; PENDEKATAN PASAR DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA**

Globalisasi, bukanlah hal baru yang kita jumpai dalam ilmu-ilmu sosial. Meskipun demikian, globalisasi merupakan sesuatu yang bersifat umum dalam konteks sosial masyarakat (Wolf, 2007). Semenjak runtuhnya tembok berlin yang menandakan

berakhirnya perang dingin serta runtuhnya rezim *Soviet* sebagai simbol komunisme. Sejak itu upaya untuk internasionalisasi ide ataupun gagasan “pembangunan” dilancarkan oleh Negara Barat ‘berkuasa’. Globalisasi dengan gagasan perubahan paradigma dengan model kapitalisasi dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat diharapkan mampu untuk memberikan keuntungan besar bagi Negara pencetusnya. Banyak literatur sosial yang menjelaskan tentang isu-isu globalisasi dari arah lokal hingga arah global. Menurut Petras dan Veltmeyer (2001:1) “globalisasi merupakan suatu gambaran dan resep, dianggap sebagai ideology dalam dominasi cara pikir serta mempengaruhi *decision maker* dalam pengambilan keputusan dan merubah perilaku politik. Globalisasi menunjukkan peluasan dan pendalaman aliran perdagangan, modal, teknologi dan informasi internasional dalam satu pasar dunia. Globalisasi mendefinisikan suatu kompleks perubahan yang dihasilkan oleh dinamika pembangunan kapitalis maupun penyebaran nilai budaya dalam pembangunan”. oleh Keynes (Wangsa: 2011: 36) menyebutkan globalisasi merupakan sebuah peradaban baru yang hadir setelah perang dunia pertama, dengan proses panjang merubah tatanan dunia dengan ditandai ditemukannya mesin uap, telepon, telegraf, rel kereta api, mobil,

pesatnya pertumbuhan sistem perdagangan antar Negara, perkembangan perbankan, dan pasar modal. Perkembangan ini saling mendukung satu dengan lainnya. Selanjutnya Keynes menyebutkan proses itu merupakan proses internasionalisasi yang dalam prakteknya hampir lengkap. Merujuk pada pikiran Keynes tersebut, jelaslah bahwa globalisasi bersandarkan pada perkembangan teknologi. Memanfaatkan perkembangan teknologi untuk merubah paradigma masyarakat untuk lebih mempermudah segala urusan terutama urusan peningkatan ekonomi.

Selanjutnya Kurniawan (2009; 29) menyebutkan bahwa globalisasi merupakan konstruksi struktural dan cultural yang menjamin bekerjanya integrasi pasar kapital, barang dan jasa diseluruh dunia. Menurut Glatzer dan Rueschemeyer (Kurniawan, 2009: 29) sebagai batasan dalam globalisasi dapat dilihat dari lima aspek penting yaitu: [1] Meluasnya perdagangan internasional dalam hal barang maupun jasa; [2] Meningkatnya aliran modal internasional; [3] Meningkatnya internasionalisasi produksi melalui perusahaan-perusahaan transnasional dan rantai komoditi global; [4] Meningkatnya peran organisasi internasional seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF; [5] Makin meningkatnya aliran

ide-ide ekonomi yang berkarakter transnasional.

Umumnya, secara sederhana globalisasi merupakan upaya untuk mendiseminasikan gagasan secara global agar gagasan tersebut menjadi subsistem bagi pembangunan Negara tujuannya. Dengan demikian, globalisasi merupakan upaya Negara 'kuat' menguasai segala aspek kehidupan untuk meraih keuntungan besar dengan menggunakan isu-isu pembangunan, memanfaatkan kecanggihan teknologi dan mudahnya mendapatkan informasi. Menurut Kurniawan (2009) globalisasi terletak pada asumsi bahwa integrasi ekonomi dan politik telah mentransformasikan ideology dan struktur institusi domestic, terutama pada hubungan kekuasaan serta orientasi normative dan kognitif.

Dengan demikian, globalisasi merupakan upaya dalam penguasaan sumber-sumber produktif oleh Negara berkuasa kepada Negara tujuannya. Upaya tersebut dilancarkan dengan berbagai strategi-strategi agar usaha untuk mengglobalisasikan ide dapat berjalan mulus. Ada dua dimensi menurut Kurniawan (2009) yang dilancarkan globalisasi terhadap Negara yang baru berkembang. *Pertama*, integrasi ekonomi; merupakan upaya diseminasi gagasan dalam bidang ekonomi merujuk kepada konsep global dengan tolok ukurnya adalah

tingkat investasi, volume perdagangan, dan keterbukaan financial. Tingkat investasi lebih pada pergerakan modal lintas batas Negara dengan cara memberikan hak kepada para investor untuk melakukan pengontrolan atas asset-aset perusahaan di suatu Negara. Kemudian dilihat dari sisi volume perdagangan, volume perdagangan secara global yakni perdagangan lintas Negara (ekspor-impor). Dan yang terakhir adalah keterbukaan financial. Keterbukaan financial diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara global. *Kedua*, Integrasi politik; yang merupakan bentuk perjanjian kerjasama antar Negara (bilateral, multilateral) dalam hal pembangunan basis ekonomi dalam suatu Negara. Perjanjian inilah yang disebut sebagai integrasi politik, karena perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang secara politis sangat kuat. Misalnya suatu Negara bergabung dalam organisasi perdagangan dunia (WTO) kemudian mengikuti segala persyaratan maupun aturan-aturan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Secara politik, dengan itegrasi politik tersebut globalisasi dapat merambah masuk melalui kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengamankan kepentingan-kepentingan pasar dalam meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Terlebih pola tingkah laku masyarakat yang semakin konsumtif.

Berdasar penjelasan teoritik dari beberapa ilmuwan diatas menunjukkan bahwa ada korelasi antara *Negara, Pasar, dan Masyarakat (civil society)*. Negara sebagai organisasi yang mengatur sirkulasi kebijakan untuk di implementasikan kepada civil society berpandangan bahwa pengelolaan Negara menuju masyarakat sejahtera harus ada campurtangan pasar didalamnya. Pasar selaku penyedia jasa yang mampu memberikan serta menciptakan ruang-ruang baru bagi masyarakat untuk dapat mendapatkan 'nafkah' hidup. Bagi Negara, pasar mampu memberikan keinginan rakyat serta dapat pula meringankan beban Negara atas kewajiban-kewajibannya yakni menciptakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warga negaranya. Dengan demikian, Negara melalui pemerintah memberikan ruang yang luas kepada pasar sebagai bentuk kerjasama dalam mengelola serta menyediakan fasilitas-fasilitas public. Fasilitas public yang disediakan oleh 'pasar' disebut juga privatisasi (Petras dan Henri Veltmeyer, 2001).

Berangkat dari logika pasar, Negara seakan menutup mata atas ketertindasan yang dilakukan oleh pasar dalam memberikan layanan jasa ataupun dalam ruang ketenagakerjaan kepada masyarakat. Menurut hemat penulis sebagai konsekuensi logis atas

terbentuknya jalinan kerjasama antara Negara dengan pasar. Pasar dengan bebas dapat mengatur Negara karena proses seleksi dalam kepemimpinan dalam Negara tidak lepas dari campur tangan pasar (pemilik modal) dalam mensukseskan serta mengantarkan pemimpin Negara kepada singgasana kekuasaan.

### **KEBENGISAN GLOBALISASI; BELAJAR DARI NEGARA LAIN**

#### ***Perlawanan atas perkembangan globalisasi dibeberapa negara***

Pengalaman dibeberapa Negara baru berkembang menunjukkan betapa rakusnya Negara maju 'menjarah' potensi-potensi yang dimiliki oleh Negara tersebut (Negara tujuan dari globalisasi) oleh sebab itu perlawanan atas mengakarnya globalisasi dilancarkan oleh kelompok anti globalisasi karena dinilai berdampak negative atas kehidupan masyarakat, memperkaya kelompok kapital dan memiskinkan kaum marginal. Beberapa Negara menentang atas tindakan globalisasi dinegaranya dengan berbagai cara structural maupun ekstraparlementer (aksi jalanan untuk penentangan globalisasi). Spertihalnya diulas oleh International Forum on Globalization (2004: 61-78) penentangan terjadi di beberapa negara dibawah ini:

1. Afrika Selatan dengan melancarkan aksi-aksi masa oleh Kongres Serikat-serikat Buruh Afrika Selatan yang menentang tingginya tingkat pengangguran dan pembaruan pasar kerja dikarenakan oleh penyesuaian dengan aturan IMF. Selain itu, aksi masa mengecam atas hutang-hutang Negara kepada IMF yang dimanfaatkan untuk membeli senjata untuk alasan keamanan dan ketahanan dalam memberangus rakyat (pemberlakuan politik apartheid). Menjual aset-aset Negara kepada pihak swasta guna untuk menunjukkan kepada public dunia untuk mendapatkan belas kasihan IMF dalam memberikan hutang kepada Negara menjadi isu actual dilkalgan penentang globalisasi di Afrika Selatan di tahun 2000-an.
  2. Di Aljazair pada tahun 1988 terjadi tragedy kemanusiaan dengan terbunuhnya lebih dari 200 orang dalam aksi protes menentang tingginya angka pengangguran semenjak ada program penyesuaian structural (SAP=*Struktural Adjustment Program*) oleh Bank Dunia.
  3. Pada tahun 2000 terjadi pergolakan massa di Argentina memprotes pembaruan Undang-undang ketenagakerjaan yang diwajibkan oleh IMF. Bagi masa aksi, protes yang dilakukan dikarenakan oleh program penghematan oleh IMF dengan cara memotong gaji-gaji karyawan.
  4. Perlawanan dan penolakan terhadap kebijakan-kebijakan IMF/Bank Dunia terjadi di Bangladesh ditahun 2000 yang berlangsung di Praha.
  5. Upaya perlawanan-perlawanan atas kebijakan IMF dan Bank Dunia untuk memberikan standarisasi kepada Negara baru berkembang dengan SAP serta kebijakan-kebijakan lain untuk menguntungkan pihak *pemodal* (Negara Adi Kuasa) juga terjadi di Brazil, Republik Czechnya, Ekuador, Filipina, India, Italia, JamaikaJepang, Jordania, Kamerun, Kanada, Kenya, Kolombia, Korea Selatan, Kostarika, Malawai, Meksiko, Nigeria, Papua Nugini, Paraguay, Sudan, Swedia, Swiss, Thailand, dan Venezuela (tahun 1989). Semua aksi protes ditujukan kepada kebijakan-kebijakan IMF dan Bank Dunia yang 'mengkerangkeng' kebebasan serta mengkebiri kearifan local yang dimiliki oleh negaranya. Aksi protes tersebut berlangsung dari tahun 1987 hingga tahun 2001.
- Dari beberapa kasus perlawanan di beberapa negara yang diungkapkan diatas jelaslah bahwa ada ketidak beresan dengan adanya dua lembaga internasional tersebut. Dengan mnerapkan sistem (politik, ekonomi, sosial dan budaya) untuk

diterapkan dinegara-negara tujuannya. Mengembangkan teknologi informasi untuk segala aspek agar menghasilkan keuntungan bagi Negara pengendali globalisasi. Adanya agenda untuk mengintegrasikan ekonomi local menjadi ekonomi global dengan cara membuat aturan-aturan dibidang perdagangan/perdagangan bebas (dibuat oleh WTO) ataupun aturan penyesuaian standar (SAP) yang dibuat oleh IMF/Bank Dunia.

### ***Sepenggal perjalanan globalisasi di Indonesia***

Semenjak dimunculkan isu *development*, di era pemerintahan orde baru, semenjak itu pula banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang berafiliasi dengan pihak korporasi. Baik korporasi local maupun korporasi global. Globalisasi membuat bangsa Indonesia menjadi Negara konsumtif dan seakan menjadi Negara dengan ketergantungan yang tinggi terhadap Negara adi kuasa (dalam hal ini Amerika Serikat).

Indonesia dalam kacamata global merupakan lahan basah bagi korporasi global. Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, ditambah dengan iklim potensi bisnis yang cukup cemerlang membuat mata para korporasi “membiru”. Untuk itu, para korporasi melancarkan “agresi” ekonomi

dengan metode neo-kolonialisme yang dibalut dengan globalisasi. Semenjak dihembuskannya ‘ruh’ globalisasi di Indonesia, semasa rezim Orde Baru berkuasa menelurkan kebijakan-kebijakan pembangunan yang mengarah kepada *westerinisasi* yang berkiblat ke Amerika Serikat. Memperkuat basis-basis ekonomi dengan metode hutang dengan IMF untuk pembangunan (semasa itu ada Repelita=*Rencana Pembangunan Lima Tahun*). Untuk pertama kalinya Indonesia digelontorkan pinjaman di tahun 1969 hingga tahun 1973 untuk mendanai penyusunan repelita melalui IGGI (*Inter Governmental Group on Indonesia*) yang disponsori oleh anggotanya seperti ADB/*Asian Development Bank*, IMF, UNDP/*United Nation for Development Program*, Bank Dunia, dan beberapa Negara pengikutnya (Australia, Belgia, Britaniaraya, Canada, Prancis, German, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swis dan Amerika Serikat). IGGI ini diebntuk oleh Amerika Serikat dengan tujuan untuk mengkoordinasikan bantuan yang bersifat multilateral kepada Indonesia sejak tahun 1961 (baca selengkapnya di [http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok\\_antarpemerintah\\_bagi\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_antarpemerintah_bagi_indonesia)).

Melalui tangan IMF, Negara Adikuasa (Amerika Serikat) terus menggelontorkan uang pinjaman kepada Pemerintah Indonesia dengan imbalannya adalah

memuluskan jalannya korporasi global untuk ikut andil memperkuat ekonomi dengan cara menguasai aset-aset produktif dan vital seperti perusahaan-perusahaan milik Negara yang produktif, misalnya perusahaan dalam bidang pertambangan. Dan lain sebagainya. Selain itu pemerintah memberikan ruang yang selebar-lebarnya bagi para investor asing untuk berinvestasi serta melancarkan perdagangan di Indonesia, termasuk membangun pusat industry pakaian (Levis), sepatu (Nike) dan lain sebagainya untuk beroperasi di Indonesia yang mempekerjakan rakyat dengan upah yang sangat murah. Inilah yang menguntungkan bagi korporasi untuk berinvestasi di Indonesia.

Kemudian seiring berjalannya waktu, rezim orde baru digoyang oleh kelompok reformis di tahun 1998 dengan isu-isu penolakan terhadap IMF, nasionalisasi aset-aset yang dikuasai asing, reformasi pemerintahan (dari otoriter ke sistem demokratis) dan lain sebagainya. Dari proses ini, konflik antar kelas pun terjadi. Dengan demikian, mulailah para 'globalis' masuk lagi melancarkan aksinya untuk terus menguasai Indonesia dengan cara memberikan jalan keluar yakni memanfaatkan isu-isu HAM, gender, demokrasi, dan penegakan hukum. Seakan telah di seting sebelumnya. Isu-isu tersebut mengacu pada standarisasi global. Itulah yang disebut oleh para agen reformis

sebagai reformasi total bagi Bangsa Indonesia.

Mengenai hutang luar negeri, karena kuatnya penolakan terhadap kehadiran IMF maka di era itu IMF angkat kaki dari bumi NKRI/Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, dengan metode baru pula para agen kapital tak hilang akal untuk mengatasinya agar Indonesia terus bergantung dengan hutang karena isu pembangunan yang diluncurkan oleh globalisasi tadi. Semasa itu pula muncul lembaga IMF dengan wajah baru yakni CGI (*Consultative Group on Indonesia*) sekaligus sebagai wajah baru dari IGGI yang juga dimotori oleh kepentingan kapitalisme. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keluarnya IMF dan masuknya CGI bagaikan 'keluar dari kandang macan dan masuk ke kandang singa'.

Selanjutnya agar para antek-antek globalisasi (seperti WTO) dapat dengan mudah masuk ke Indonesia maka semenjak runtuhnya orde baru perubahan-perubahan terhadap konstitusi pun terjadi. Konstitusi dirubah lebih cenderung berpihak kepada korporasi global. Sebagai contoh dampak terhadap perubahan konstitusi adalah maraknya kebijakan impor karena perdagangan bebas (*free trade*) serta penguasaan aset oleh pihak asing. Hingga saat ini banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak

kepada korporasi. Menurut hemat penulis, itulah strategi para agen globalisasi untuk menguasai Indonesia melalui birokrasi, politik, serta budaya.

### **BIROKRASI PEMERINTAHAN YANG TERSANDERA**

Hutang merupakan solusi utama bagi Negara yang baru berkembang untuk keluar dari jeratan krisis ekonomi yang membelitnya. Di Indonesia, sejak orde baru hingga orde reformasi, fenomena hutang bukan hanya semakin menipis melainkan sebaliknya. Hutang Negara semakin membengkak menjadikan Negara semakin pragmatis dalam mewadahi rakyat mencapai kesejahteraan yang diimpikan. Fenomena hutang seperti yang dilansir oleh Editorial Media Indonesia (25/11/2011) menyebutkan bahwa hutang Indonesia dari tahun 2001 hingga tahun 2011 terus meningkat kurang lebih Rp. 50 triliun pertahunnya. Fakta hutang tahun 2001 sebesar Rp. 1.273 Triliun dan tahun 2011 sebesar Rp. 1.768 Triliun. Tak dapat dipungkiri dari data-data tersebut. Semakin tinggi hutang maka semakin tinggi pula rasa ketergantungan terhadap Negara pemberi hutang. Dan para pemberi hutang akan senantiasa menghipnotis pemerintah agar terus berhutang dengan cara membuat standarisasi pembangunan mulai dari pendidikan, kesehatan, gender, penegakan hukum, lingkungan, kematian

bayi, dan lain sebagainya. Artinya, dengan standarisasi yang dibuat oleh Negara “kuasa” Negara Indonesia dapat dinilai keberhasilannya dalam penerapan program-program global. Untuk itu, berdasar standarisasi tersebut Pemerintah Indonesia membutuhkan biaya lebih, dalam pencapaian standar tersebut. Biaya itu didapat dari proses hutang tadi. Sungguh picik bukan? Logikanya, dengan membengkaknya hutang, maka dengan mudah pula pihak korporasi megatur pemerintah dalam sirkulasi kebijakan yang berpihak kepada korporasi. Disinilah letak diseminasi paham globalisasi terhadap NKRI (Kurniawan: 2009).

Selain fenomena hutang, adapula fenomena privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini merupakan konsekuensi logis atas “akad hutang” Negara terhadap Negara donor. Privatisasi atas aset-aset produktif dengan alasan modernisasi system kelembagaan dalam BUMN yang notabene tidak mendapat keuntungan bagi pemerintah padahal hal tersebut menurut hemat penulis adalah akal-akalan pemerintah karena ketergantungan atas hutang tadi.

Upaya me-McDonaldisasi-kan, Amerikanisasi, dan Kapitalisme (Ritzer: 2006) merambah dari pemerintah hingga ke masyarakat sipil (*civil society*). Dengan demikian kultur masyarakat produktif berubah total menjadi konsumtif, dan

pemerintah seakan menutup mata untuk perubahan tersebut. Oleh Susetiawan (2009) disebut sebagai ketidakberdayaan Negara dalam melawan konstruksi neoliberalisme. Konstruksi neoliberalisme yang disebutkan adalah konstruksi sosial dengan diseminasi ideology pembangunan (*free market ideology*) secara global untuk diterapkan dinegara maju baru berkembang dengan cara menguasai aset-aset produktif melalui lembaga kapital neolib (TNC/MNC=*Trans National Corporation/Multi national Corporation*) kemudian dijalankan oleh *komprador* ekonomi seperti WTO, IMF dan Bank Dunia. Mereka menyerang masuk melalui Negara (Pedagang, Militer, Birokrat). Dengan logika tersebut Negara menjadi lemah karena suntikan dari *komprador* ekonomi neolib tadi. Oleh sebab itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara lebih cenderung memihak kepada kelompok kapital. Bagi penulis ada share hasil dari capital kepada para birokrat pemerintahan sebagai imbalan kelancaran dalam bertransaksi secara aman dan menguntungkan.

Untuk kepentingan korporasi, rakyat menjadi korban atas kebijakan yang berpihak kepada korporasi global tersebut. Sebagai contoh sederhana adalah mencabut subsidi (listrik, air, dan bahan bakar minyak) yang seharusnya menjadi tanggungjawab Negara untuk memenuhi

kebutuhan hidup masyarakat justru berbalik arah, sungguh ironis! Sejalan dengan pemikirannya Khor (dalam International Forum on Globalization, 2006: 163-172) menyebutkan bahwa Ada tiga isu utama yang meresahkan Negara sedang berkembang yaitu: 1] *Investasi*; yaitu memberikan keleluasaan kepada investor asing untuk mengelola aset-aset, mempermudah mereka dalam melakukan aksi investasinya melalui peraturan-peraturan Negara., 2] *Kebijakan persaingan*; yaitu menerapkan azas inti dari WTO, menekan perusahaan local untuk berkembang melalui otoritas Negara. Misalkan kebijakan impor dan distribusi., dan 3] *Belanja pemerintah*; oleh WTO, dalam upaya untuk memenangkan proyek-proyek penyediaan barang public maka diberikan pasokan persediaan kepada pemerintah yang diambil dari keuntungan perusahaan yang sedang berjalan. Pada intinya WTO menempatkan kebijakan keputusan dan prosedur pembelanjaan sesuai dengan standar WTO agar mudah untuk memprivatisasi aset-aset Negara berkembang tersebut. Dengan kata lain, pemerintah menyediakan ruang yang luas kepada investor asing. Atas dasar itulah negara tidak lagi memandang kepentingan rakyat sebagai motor penggerak keberhasilan dalam tatakelola pemerintahan.

## **MENGEMBALIKAN MARWAH YANG TERKOYAK; HARGA MATI UNTUK PERWUJUDAN KEMANDIRIAN BANGSA**

Tingginya tingkat ketergantungan Negara Indonesia kepada Negara donor membuat bangsa Indonesia seperti singa tanpa taring, ayam tanpa taji. Kondisi masyarakat yang semakin pragmatis dan praktis, lebih konsumtif menggambarkan kondisi miris era kekinian. Kita sering melupakan karakter bangsa sendiri dikarenakan oleh *modernism* yang diumbar oleh globalisasi. Padahal bangsa kita memiliki *social capital* untuk bangkit menjadi berdikari dan mandiri seperti halnya ajaran Trisakti Bung Karno yakni *berdaulat di bidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan bangsa Indonesia* (selengkapnya baca di <http://www.marhaennews.com/534/bung-karno-dan-hutang-negara.html>). Ajaran trisakti Bung Karno ini merupakan pondasi utama dalam membangun perekonomian dan jati diri bangsa. Untuk menerapkannya maka perlu tindakan ekstrem yakni memutus mata rantai hutang dan menyelesaikan hutang-hutang dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Globalisasi diganti dengan “domestikasi” agar tidak ada ketergantungan dengan lembaga pencipta keuangan asing. Mengembalikan

aset-aset yang telah diprivatisasi menjadi nasionalisasi.

Dengan demikian, penulis meyakini bahwa jati diri bangsa sesuai dengan cita-cita kemerdekaan akan terkabulkan. Oleh sebab itu Indonesia menjadi Negara berwajah baru tanpa bayang-bayang kolonialisme neoliberal atas ekonomi, politik dan budaya Indonesia.

## **PENUTUP**

Ketergantungan bangsa Indonesia akan hutang luar negeri membuat bangsa ini semakin lekat dengan ketergantungan pada Negara Adikuasa. Inilah globalisasi yang dihembuskan kepada Indonesia dalam bungkusan kedok pembangunan (*developmentalisme*). Tanpa disadari bahwa Indonesia diakali dengan ‘rayuan manis’ dari *developmentalisme* untuk keluar dari keterpurukan ekonomi. Dengan ideology globalism kaum pemilik modal (investor) dapat masuk ke Indonesia dan menguasai birokrasi pemerintahan yang dilihat dari keberpihakan kebijakan pemerintah pada para pemodal asing. Spertihalnya kebijakan impor, pencabutan subsidi, privatisasi air, privatisasi listrik, privatisasi sumberdaya alam, dan lain sebagainya.

Pemerintah, dengan sengaja membentuk perilaku hidup masyarakat menjadi pragmatis dan konsumtif yang diiringi dengan berkembangnya teknologi-

informasi. Dengan demikian para pihak korporasi dengan mudah masuk di segala lini kehidupan masyarakat, termasuk merubah perilaku birokrasi pemerintah yang semakin hedonis. Dimotori oleh komprador globalisasi, Negara Indonesia dibiarkan menjadi Negara dengan ketergantungan tinggi. Mengikuti standarisasi internasional atas aspek-aspek pembangunan.

Untuk mengatasinya, perlu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan berbangsa dan bernegara, karena dengan nilai-nilai Pancasila, globalisasi dapat difilter. Nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila mampu meng-*cuonter* kebengisan globalisasi. Mengingat kembali serta menerapkan ajaran trisakti bung Karno sebagai landasan pengambilan keputusan oleh birokrasi pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan berpihak kepada rakyat. Dengan demikian, kesenjangan antara kaum borjuis dan proletar tidak terlalu jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahagijo, Sugeng. (ed.), 2006, *Globalisasi Menghempas Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- International Forum on Globalization (terjemahan: A. Widyamartaya dan AB. Widyanta), 2004, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, Cindelaras Pustaka Rakyat, Yogyakarta
- Khor, Martin, 2004, Negara-negara Sedang Berkembang Menjadi Tumbal Kebijakan WTO, *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*, hal 163-172
- Kurniawan, Nanang Indra, 2009, *Globalisasi dan Negara Kesejahteraan: Perspektif Institusionalisme*, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta
- Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2001, *Kedok Globalisasi; Imperialisme Abad 21*, terjemahan, Ceraka Nusantara
- Wangsa, Lalu Mara Satria, 2011, *Merebut Hati Rakyat Melalui Nasionalisme, Demokrasi, dan Pembangunan Ekonomi; Sumbangan Pemikiran Aburizal Bakri*, PT. Primamedia Pustaka, Cetakan kedua, Jakarta
- Wolf, Martin, 2007, *Globalisasi Jalan Menuju Kesejahteraan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Ritzer, George, 2006, *The Globalization of Nothing; Mengkonsumsi Kehampaan di Era Globalisasi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta

Susetiawan, 2009, *Pembangunan dan kesejahteraan; Ketidakberdayaan Para Pihak Melawan Konstruksi Neoliberalisme*, Working Paper, Studi Pembangunan dan Kesejahteraan Fisipol UGM, Yogyakarta

**Sumber lain:**

1. <http://www.marhaennews.com/534/bung-karno-dan-hutang-negara.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2011
2. [http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok\\_antarpemerintah\\_bagi\\_indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/kelompok_antarpemerintah_bagi_indonesia), diakses pada tanggal 24 Desember 2011
3. <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/11/25/279035/70/13/Utang-kian-Menggunung-> diakses pada tanggal 25 November 2011